

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tahun 2019 lalu merupakan momentum kelahiran bagi partai baru bernama Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Partai yang dipimpin oleh Anis Matta ini sejak awal menawarkan narasi arah baru Indonesia sebagai kekuatan lima besar dunia. Melalui penguatan narasi diiringi dengan berbagai strategi, Partai Gelora Indonesia berharap dapat mendulang suara yang tinggi dalam pemilihan umum tahun 2024. Tidak ingin mengulang sejarah, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan umum 2019 lalu, berdasarkan data KPU bahwa dari 5 (lima) partai baru tidak ada satupun lolos *parliamentary threshold* yang ditetapkan sebesar 4%. Dengan demikian, Partai Gelora Indonesia dari jauh-jauh hari melakukan strategi dan terobosan yang dinilai lebih efektif dari partai-partai sebelumnya. Terbukti, kurang dari 3 tahun dari sejak berdirinya, partai Gelora Indonesia telah mengantongi jumlah anggota yang cukup signifikan, pertumbuhannya pertanggal 30 Agustus 2021 yaitu 2800 anggota setiap harinya. Selain itu partai Gelora Indonesia dinobatkan oleh beberapa lembaga survei sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi di antara partai-partai baru lainnya, sebut saja partai Masyumi Reborn, Partai Umat dan Partai Hijau Indonesia.

Seperti yang dilansir dari tribunnews.com, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Indonesia Mahfuz Sidik menanggapi hasil survei yang menyatakan partai besutan Anis Matta dan Fahri Hamzah itu memiliki popularitas dan elektabilitas tertinggi di

antara partai-partai baru. Data tersebut disampaikan oleh Project Manager *Rekode Research Center* Lisdiana Putri saat memaparkan hasil survei nasional dengan tajuk 'Peluang Partai Baru Mewarnai Politik Indonesia 2024' di Jakarta, Selasa (1/6/2021). Tidak mengherankan, sejak kelahirannya Partai Gelora Indonesia cukup menarik perhatian publik karena selain para pimpinan dan pendiri merupakan tokoh-tokoh nasional yang sudah mencicipi asam garam dunia politik Indonesia, juga karena gagasan-gagasan politiknya bisa dikatakan tidak populis.

Survei lain yang dilakukan Kompas misalnya, menyatakan bahwa mayoritas responden tidak mengetahui nama-nama partai politik baru. Dari sedikit responden yang mengetahui nama partai baru itulah, nama Partai Gelora dan Partai Ummat lebih banyak muncul.

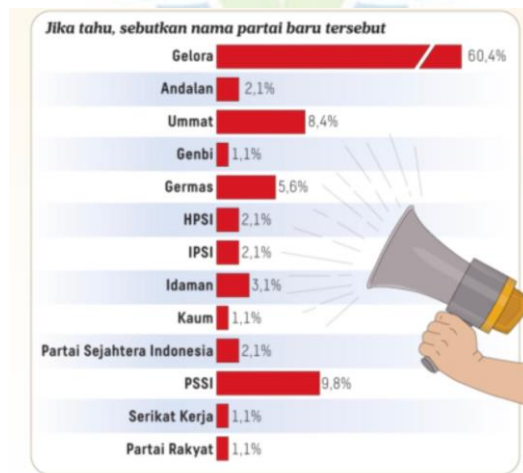


Figure 1: Grafik Pengetahuan Responden terhadap Partai Baru
Source: Litbang Kompas

Tentu saja, sebagian kelompok menganggap akan sulit bagi partai-partai baru untuk berkembang termasuk Partai Gelora Indonesia. Apalagi yang terberat

adalah soal popularitas partai. Nyatanya, di usia nya yang kurang dari tiga tahun, partai Gelora mampu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Pertanggal 5 September 2021, tercatat pertumbuhan struktur DPW dan DPD seluruh Indonesia sudah 100% terpenuhi. Adapun struktur DPC sudah terpenuhi di angka 81,7%, dan struktur di bawahnya terus tumbuh secara signifikan.



Figure 2: Pertumbuhan Struktur Gelora Indonesia
Source: Bidang Rekrutmen DPN Gelora Indonesia

Pencapaian tersebut berkat terobosan-terobosan baru dalam pendekatan dan proses yang adaptif, elaboratif dan emansipatif. Tanpa kemampuan di tiga hal tersebut, partai Gelora sebagai partai baru akan sulit meraih suara, bahkan sekedar dikenal baik oleh para konstituen. Pendekatan yang adaptif, elaboratif dan emansipatif itu hanya bisa dilakukan dengan strategi dan metode yang tepat, dan keterlibatan seluruh komponen partai termasuk kaum perempuan di dalamnya. Tidak dapat dipungkiri, pencapaian tersebut juga merupakan hasil dari partisipasi politik kader perempuan yang juga begitu masif dan signifikan melakukan

pendekatan yang emansipatif kepada konstituen. Terbukti dari data hasil rekrutmen bahwa jumlah anggota baru yang mendaftar sebagiannya adalah kaum perempuan.

Narasi-narasi politik yang dikembangkan menyoal peran penting partisipasi politik perempuan, isu-isu keperempuanan yang berbicara pada kajian-kajian yang menggali persoalan perempuan di masyarakat, serta keterbukaan partai Gelora kepada semua golongan, lintas etnis, budaya, dan agama menjadi pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk menarik hati para perempuan.

Setiap strategi dan metode yang dilakukan berdasarkan kajian yang komprehensif dan data yang valid, hal ini menunjukkan budaya kerja partai yang berbasis pengetahuan. Termasuk menyoal pendekatan, strategi dan metode yang dihasilkan dirasakan begitu humanis, akomodatif dan emansipatif. Meskipun tidak secara formal, perempuan Partai Gelora menyebutnya sebagai model dakwah emansipatoris, namun secara substansial spirit yang dibangun baik secara pemahaman maupun praktis adalah perwujudan dari konseptualisasi emansipatoris.

Terbukti sejak dari awal, Partai Gelora Indonesia memberikan ruang yang cukup besar dan strategis bagi kaum perempuan. Jika dilihat dari struktur kepengurusan, peta sebaran kaum perempuan tidak hanya di bidang perempuan, namun juga tersebar ke semua bidang. Bahkan ada beberapa bidang dengan perempuan sebagai ketua bidangnya. Hal ini menunjukkan kesungguhan Partai Gelora untuk melibatkan perempuan tidak hanya dengan tujuan memenuhi *affirmative action* 30% saja, namun juga secara substansial Partai Gelora Indonesia mendorong partisipasi politik perempuan agar terus meningkat.

Kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting bagi Indonesia yang dapat berkontribusi secara signifikan sesuai kapabilitas dan kemampuannya. Perempuan menurut pandangan sejarah memainkan banyak peran. Perempuan sebagai ibu, istri, petani, pengelola perusahaan, pekerja sukarela, kepala desa, dll. Lebih dari itu perempuan Indonesia pada umumnya, telah sangat berperan dalam bidang politik pemerintahan seperti menjadi Presiden RI, Gubernur, Menteri, Bupati, Camat, dan lain sebagainya. Hal ini semakin menegaskan bahwa perempuan dalam kehidupannya tidak hanya memainkan peran domestik tetapi multi peran dalam masyarakat.

Berdasarkan data BPS pada 2019, sebanyak 131 juta jiwa atau hampir setengah dari populasi penduduk Indonesia adalah perempuan. Data ini menggambarkan bahwa perempuan merupakan penyumbang setengah dari kekuatan sumber daya manusia bangsa ini. Sehingga, keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Negara tidak mungkin sejahtera jika para perempuannya dibiarkan tertinggal, tersisihkan dan tertindas. Seperti yang diungkapkan Vivekananda¹

“Negara dan bangsa yang tidak menghormati kaum perempuannya tidak akan pernah menjadi besar, baik di saat ini maupun di masa depan. Satu alasan mendasar sebagai penyebab kejatuhan bangsa anda secara drastis adalah karena anda tidak memiliki rasa hormat pada kehidupan perempuan yang di lukiskan sebagai sakti (istri). Sehingga pembangunan yang utuh dan

¹M. Muhadjir Darwin, *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. (Yogyakarta: Media Wacana, 2005), 8.

menyeluruh dari suatu negara menuntut peranan penuh dari kaum perempuan dalam segala bidang kehidupan.”

Faktanya, keterlibatan perempuan belum merata di berbagai sektor termasuk sektor politik. Sehingga diperlukan kebijakan afirmatif sebagai instrumen regulasi perempuan masuk institusi politik (partai dan parlemen) sehingga efektif dalam menambah jumlah kehadiran perempuan, meskipun belum signifikan mengubah relasi kuasa di dalam sistem politik itu sendiri. Terutama partai politik, sebagai *instrument* kaderisasi politik perempuan, harus berperan aktif membangun *attention* perempuan terhadap politik. Apa yang dilakukan partai Gelora Indonesia, menjadikan perempuan tidak hanya menjadi *instrument* kemenangan partai, namun lebih dari itu melalui pendekatan emansipatoris perempuan didorong membebaskan pikiran, langkah gerak dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

Dengan demikian perempuan yang bergabung di partai Gelora memiliki rasa percaya diri yang tinggi, siap mengambil peran politik secara riil maju di perhelatan pemilu 2024 mendatang. Partai Gelora optimis mampu memenuhi kuota keterwakilan perempuan, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Keterwakilan perempuan di ranah politik sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. UU No 2/2008 mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30

persen dalam pendirian maupun dalam kepengurusan di tingkat pusat dan di tingkat daerah (Pasal 2 dan Pasal 20).²

“Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris”

Pengaturan yang lebih penting dalam rangka *affirmative action* agar perempuan dapat semakin berkiprah di lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai daftar bakal paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Pasal 53 UU Pemilu No 10 Tahun 2008 menyatakan: *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan”*. Sementara, ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta Pemilu. Dengan demikian, *affirmative action* keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.³

²Website Puskapol UI, *Center for Political Studies*. Diakses pada tanggal 1 September 2021

³*Ibid*

Tren peningkatan rekrutmen politisi perempuan sebagai caleg terjadi hampir di semua partai politik. Berikut kontribusi suara caleg Perempuan DPR RI perolehan suara Partai politik pada pemilu tahun 2019 lalu.

| Parpol | Perolehan Suara Keseluruhan | Persentase Suara Partai | Persentase Suara Caleg Perempuan |
|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| PDIP | 27.053.961 | 19,33 | 25,61 |
| Gerindra | 17.594.839 | 12,57 | 21,24 |
| Golkar | 17.229.789 | 12,31 | 24,23 |
| PKB | 13.570.097 | 9,69 | 21,40 |
| Nasdem | 12.661.792 | 9,05 | 32,03 |
| PKS | 11.493.663 | 8,21 | 21,29 |
| Demokrat | 10,876,507 | 7,77 | 20,63 |
| PAN | 9.572.623 | 6,84 | 18,55 |
| PPP | 6.323.147 | 4,52 | 23,14 |

Figure 3: Pertumbuhan Kontribusi Suara Caleg Perempuan DPR RI
Source: Cakra Wikara Indonesia

Data CWI menunjukkan pada Pemilu 2019, rata-rata perolehan suara caleg perempuan DPR mencapai 24%, sedangkan keterpilihan “hanya” 20.9%. Ada kesenjangan antara pencalonan perempuan (>30%), perolehan suara caleg perempuan (24%), dan keterpilihan (20%). Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan kuota pencalonan 30% dari masing-masing Partai Politik tidak selalu berimplikasi pada keterpilihan suara perempuan.⁴

⁴Anna Margret, dkk. *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. (UI Depok: Cakra Wikara Indonesia, 2018), 25.

Padahal, perempuan mempunyai peran strategis dalam pembelaan terhadap isu-isu perempuan. Keikutsertaan perempuan di bidang politik merupakan tindakan dalam rangka mengangkat harkat serta kualitas dari perempuan itu sendiri. Secara lebih strategis, kontribusi perempuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dengan mengambil peran politis yang akan mendorongnya pada sebuah posisi strategis untuk mengambil kebijakan yang berpihak kepada perempuan, anak dan kaum marjinal.

Namun, kualitas saja tidak cukup. Seorang politisi perempuan harus memiliki empati yang tinggi, kemampuan analitik yang baik, berpikir strategis, dan bagi seorang politisi perempuan muslim harus memiliki komitmen terhadap dakwah Islam. Sehingga diperlukan pendekatan dan model yang tepat untuk menyampaikan gagasan politik ke publik. Tidak hanya efektif meningkatkan elektabilitas dan popularitas partai, namun juga efektif meningkatkan partisipasi politik dan keterpilihan suara perempuan. Pendekatan dan model tersebut dimulai dari dataran abstrak hingga sangat riil dan melibatkan kerja kolosal seluruh pihak termasuk perempuan Gelora di dalamnya.

Hal ini dimulai dari usaha merancang model dakwah emansipatoris dan implementasinya dalam proses dakwah emansipatoris. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengkaji, memahami, menjelaskan sekaligus menggali terkait dengan dakwah politik perempuan berbasis pendekatan emansipatoris pada pengurus perempuan Partai Gelora Indonesia, dengan sebuah judul ***Dakwah Emansipatoris Melalui Partisipasi Politik Perempuan (Kajian Pada Perempuan Partai Gelora Indonesia)***.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada pendekatan dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia. Objek penelitian yang lebih khusus adalah konstruksi sosial perempuan Partai Gelora Indonesia yang akan dianalisis dengan teori konstruksi sosial dari Peter L Berger dan Thomas Luckman. Interaksi sosial perempuan partai Gelora Indonesia yang akan dianalisis dengan teori interaksionisme simbolik Herbert Mead dan implementasi dakwah emansipatoris perempuan partai Gelora Indonesia yang akan dianalisis menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens. Partisipasi politik perempuan dikaji dengan konsep dan pendekatan dakwah emansipatoris adalah satu dari sekian banyak aspek yang menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penelitian ini dapat difokuskan menjadi:

1. Bagaimana konstruksi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia melalui partisipasi politik?
2. Bagaimana interaksi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia melalui dakwah partisipasi politik?
3. Bagaimana implementasi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Merujuk pada fokus penelitian, bahwa tujuan penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai partisipasi politik perempuan melalui dakwah emansipatoris yang dianggap sebagai sebuah konstruksi sosial yang kemudian menjadi sebuah realitas sosial politik. Secara lebih khusus tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Memahami konstruksi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia melalui partisipasi politik.
2. Menjelaskan interaksi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia melalui partisipasi politik.
3. Menjelaskan implementasi dakwah emansipatoris perempuan Partai Gelora Indonesia.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoritis bagi kajian dan pengembangan disiplin ilmu dakwah dalam pendekatan ilmu sosiologi.
2. Secara praktis kajian dakwah emansipatoris sebagai alternatif pendekatan dakwah bagi partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

1.4 Landasan Pemikiran

Perempuan dan politik merupakan dua hal yang senantiasa menjadi isu yang hangat diperbincangkan, tidak hanya di kalangan pemerhati politik dan studi perempuan, tetapi juga di kalangan ilmuwan Islam. Sehingga pada bagian ini, peneliti ingin mengelaborasi partisipasi politik perempuan berbasis dakwah emansipatoris. Melalui kajian teori-teori sosiologi, elaborasi panjang perempuan dalam pendekatan sosiologis, dakwah dan politik diperlukan dalam upaya mendudukan landasan pemikiran. Bahwa topik pembahasan tentang perempuan dan politik adalah bagian yang *inheren* dari dakwah itu sendiri, dan dakwah adalah salah satu bentuk aktivitas sosiologis. Sehingga dapat dipastikan bahwa topik penelitian ini, sebagai bagian dari kajian dan ruang lingkup program studi Komunikasi Penyiaran Islam menjadi relevan untuk dikaji.

Pada bagian awal landasan pemikiran ini, perlu kiranya untuk memetakan tentang hubungan fungsional antara perempuan, dakwah dan politik. Adapun dakwah politik merupakan ajakan untuk tujuan politik, sedangkan politik dakwah merupakan strategi dalam melaksanakan dakwah Islam. Maka perempuan sebagai subjek dakwah politik merupakan sebuah entitas yang penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Persoalannya adalah, tidak sedikit masyarakat yang berpandangan bahwa kegiatan politik adalah satu sisi dan dakwah adalah sisi yang lain. Persepsi semacam itu tentu merugikan bagi dakwah maupun politik itu sendiri, sehingga perlu upaya untuk melihat secara utuh hubungan di antara keduanya.

Dakwah Islamiah merupakan aktualisasi teologis yang dimanifestasikan dalam sistem kehidupan masyarakat yang secara teratur dan cara-cara tertentu untuk mempengaruhi rasa, pikir, sikap dan tindakan pada ranah individual dan sosio-kultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan.⁵

Dalam al-Qur'an Surat an-Nahl [19]: 125 dijelaskan cara-cara dakwah: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*⁶

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa dimensi pemaknaan dakwah lebih cenderung pada konsep praktis yang meliputi tabligh keagamaan, propaganda politik, dakwah sebagai aplikasi dari jihad politik, dan dakwah yang meliputi semua aspek kehidupan manusia.⁷ Dalam pelaksanaannya, tugas dakwah ini mirip dengan tugas kerasulan Muhammad Saw. yang berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia secara universal, dan membawa misi dakwah untuk memperingatkan dan memanggil manusia ke jalan yang benar.⁸

⁵Amrullah Ahmad, *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Prima Duta, 1983), 3.

⁶A-Qur'an, 19:125.

⁷Ahmad Anas, *Paradigma Dakwah Kontemporer: Aplikasi Teoritis dan Praktis Solusi Problematika Kekinian* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2006), 19.

⁸Mohammad Natsir, *Fiqhud Da'wah* (Jakarta: Media Dakwah, 2000), 125.

Dakwah Islam juga merupakan sebuah aktivitas komunikasi sehingga keberhasilannya tergantung pada beberapa komponen yang mempengaruhinya, yakni *da'i* sebagai orang yang menyampaikan pesan (komunikator), *mad'u* sebagai orang yang menerima pesan (komunikan), materi dakwah sebagai pesan yang akan disampaikan, media dakwah sebagai sarana yang akan dijadikan saluran dakwah, dan metode dakwah sebagai cara yang digunakan untuk berdakwah. Adanya keharmonisan antar unsur tersebut diharapkan tujuan dakwah bisa tercapai secara maksimal. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat dewasa ini, komponen-komponen dakwah tersebut juga dituntut mengikuti perkembangan agar aktivitas dakwah dapat diterima oleh masyarakat sebagai satu elemen tersendiri bagi proses modernisasi.⁹

Dalam pengertian agama, dakwah mengandung arti panggilan dari Tuhan untuk umat manusia agar percaya kepada ajaran Islam dan mewujudkan ajaran yang dipercayainya itu dalam segala segi kehidupannya. Diyakini oleh umat Islam, bahwa tugas Nabi Muhammad adalah mendakwahkan Islam. Dalam konteks itu, kegiatan dakwah dapat mengambil dua bentuk, yakni dakwah struktural dan dakwah kultural.¹⁰

Dakwah kultural adalah dakwah yang dilakukan dengan cara mengikuti budaya-budaya kultur masyarakat setempat dengan tujuan agar dakwahnya

⁹Awaludin Pimay, *Paradigma Dakwah Humanis: Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri* (Semarang: Rasail, 2005), 15; Hamzah Khaeriyah, Dakwah dalam Bingkai Politik, *Jurnal Tasamuh* Volume 10, Nomor 1 (April 2018), 33.

¹⁰Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 8.

dapat diterima di lingkungan masyarakat setempat. Dakwah kultural juga bisa berarti kegiatan dakwah dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka menghasilkan kultur baru yang bernuansa Islami atau kegiatan dakwah dengan memanfaatkan adat, tradisi, seni dan budaya lokal dalam proses menuju kehidupan Islami.¹¹

Dakwah kultural juga dapat dipahami dakwah Islam dengan pendekatan kultural, yaitu:

1. Dakwah yang bersifat akomodatif terhadap nilai budaya tertentu secara inovatif dan kreatif tanpa menghilangkan aspek substansial keagamaan.
2. Menekankan pentingnya kearifan dalam memahami kebudayaan komunitas tertentu sebagai sasaran dakwah.

Jadi, dakwah kultural adalah dakwah yang bersifat *bottom-up* dengan melakukan pemberdayaan kehidupan beragama berdasarkan nilai-nilai spesifik yang dimiliki oleh sasaran dakwah. Lawan dari dakwah kultural adalah dakwah struktural, yaitu dakwah yang menjadikan kekuasaan, birokrasi, kekuatan politik sebagai alat untuk memperjuangkan Islam. Karenanya dakwah struktural lebih bersifat *top-down*.¹²

Dakwah struktural adalah gerakan dakwah yang berada dalam kekuasaan. Aktivistis dakwah struktural bergerak mendakwahkan ajaran Islam dengan

¹¹Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 131.

¹²Noer, Mohammad. *Dakwah untuk Umat*, (Makalah dalam Workshop Program Studi Sejenis Dirjen Pendidikan Islam: Depag RI, 2007), 5

memanfaatkan baik struktur sosial, politik, maupun ekonomi guna menjadikan Islam menjadi ideologi Negara sehingga nilai-nilai Islam mengejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara dipandang sebagai alat dakwah yang paling strategis. Dakwah struktural memegang tesis bahwa dakwah yang sesungguhnya adalah ajaran Islam yang berusaha mewujudkan negara bangsa yang berdasar atas Islam, para pelaku politik menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam perilaku politik mereka, serta penegakan ajaran Islam menjadi tanggung jawab negara dan kekuasaan. Dalam perspektif dakwah struktural, negara adalah instrumen paling penting dalam kegiatan dakwah.¹³

Dakwah dalam pendekatan struktural dipahami sebagai strategi untuk mengajak seseorang, masyarakat bahkan sebuah institusi (*ma'du* atau objek dakwah) 'menerima' Islam berdasarkan tingkat status sosial (ekonomi dan pendidikan).

Gambaran tentang skema relasional antara politik dan dakwah adalah seperti yang disampaikan Asshidiqie¹⁴ bahwa di dalam Islam Tuhan bukan saja sebagai *al-Rabb (The Creator)* tetapi juga *al-Ilah (Master and Law Giver)* yang disembah dan memberi hukum kepada manusia, dapat skema berikut:

¹³Sulthon, *Desain Ilmu...*, 26-28.

¹⁴Jimly Asshidiqie, *Islam dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 21.

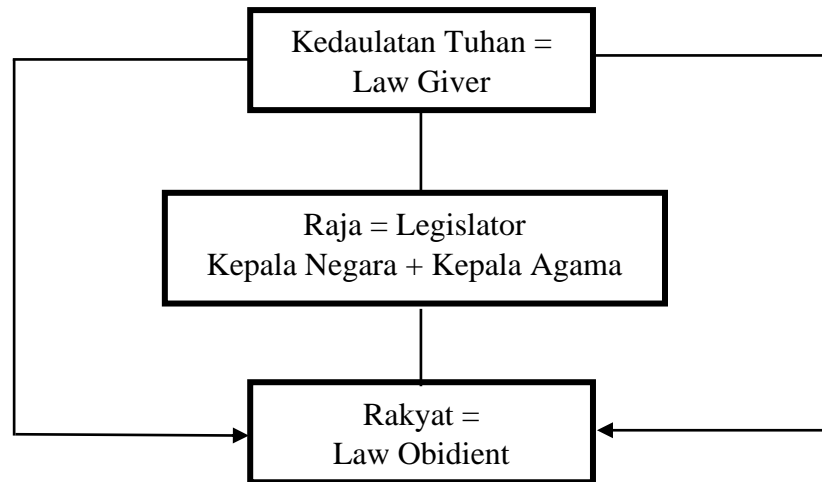


Figure 4: Skema Konsep Politik dan Dakwah
Source: Diadaptasi dari Jimly Asshiddiqie

Skema tersebut tergambar kuat dalam fragmen-fragmen sejarah yang memberikan pemahaman bahwa politik melekat dalam kehidupan umat Islam sejak risalah diturunkan. Bahkan, politik menempati ruang sepenuh sejarah umat ini mengambil tempatnya dalam perjalanan peradaban manusia.

Hal tersebut diperkuat oleh pengakuan para ilmuwan Barat, bahwa politik adalah sesuatu yang *inheren* dalam Islam dan kehidupan muslim. Di antaranya sebagai berikut:¹⁵

- 1) Menurut Fitzgerald Islam bukanlah semata agama, namun juga merupakan sebuah sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan dari umat Islam yang berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun

¹⁵Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 5.

seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan.

- 2) Menurut Nalino, Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara. Batas-batas teritorial negara yang dibangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya.
- 3) Menurut Schacht, Islam lebih dari sekedar agama. Ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan dan politik. Dalam ungkapan yang sederhana, ia merupakan system peradaban yang lengkap, yang mencakup agama dan negara secara bersamaan.
- 4) Menurut Strathmann, Islam adalah suatu fenomena agama dan politik karena pembangunnya adalah seorang nabi yang juga seorang politikus yang bijaksana atau negarawan.
- 5) Menurut Gibb, dengan demikian jelaslah bahwa Islam bukanlah sekedar kepercayaan agama individual, namun ia meniscayakan berdirinya suatu bangunan masyarakat yang independen.

Lebih lugas lagi apa yang disampaikan Al-Banna,¹⁶ bahwa politik di dalam ruang lingkup dakwah tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, di mana mekanisme kontrol berperan besar. Al-Banna mengatakan,

“Kita adalah para politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuatan eksekutif adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam.

¹⁶Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan*, (Solo: Era Intermedia, 2000), 59.

Kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah salah satu sendi dan kewajiban Islam. Karena itu, kita berkewajiban berjuang demi keutuhan kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif.”

Menjadi jelas bahwa politik adalah nafas dinamika umat, sehubungan dengan tugas yang diemban setiap muslim untuk berdakwah. Oleh karena politik adalah alat dakwah, maka aturan mainnya harus paralel dengan aturan main dakwah. Misalnya, tidak boleh melakukan kekerasan atau paksaan, tidak boleh menyesatkan, dan tidak boleh memutarbalikan kebenaran. Sebaliknya, dakwah melalui politik harus mampu menghadirkan kejujuran, keterbukaan, rasa tanggungjawab, serta keberanian menyatakan kebenaran.

Politik yang demikian sudah dapat dipastikan secara fungsional sesuai dengan tujuan dakwah. Jika yang terjadi sebaliknya, maka politik semacam itu disfungsional terhadap tujuan dakwah. Sehingga sampai di sini dapat diasumsikan bahwa dakwah melalui politik merupakan proses perbaikan (*ishlah*) melalui berbagai instrument politik yang ada.

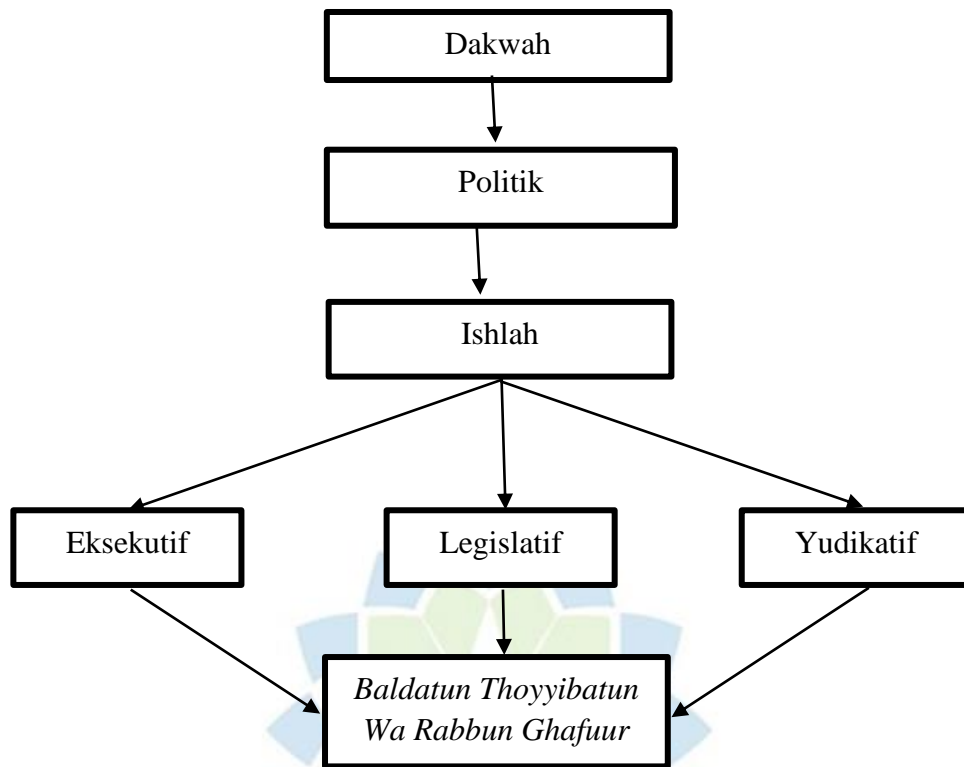


Figure 5: Ruang Lingkup Politik Dakwah
Source: Diadaptasi Buku Kiprah Politik Muslimah

Dalam tataran implementasi, dibutuhkan kinerja yang berkualitas sesuai mekanisme yang ada dalam sistem politik nasional. Agar kredibilitas politik dakwah terjaga, dan berbagai aransemen politik yang digagas tidak menimbulkan disharmonisasi. Kegagalan menjaga kredibilitas politik dakwah, terutama profesionalisme yang tidak memadai justru akan menjadi boomerang bagi dakwah secara keseluruhan. Kemampuan politisi (*da'i*) dalam hal penguasaan berbagai keterampilan sangat dibutuhkan, salah satu keterampilan yang penting adalah komunikasi. Sehingga tema ini menjadi untuk diangkat ke permukaan, agar perempuan yang berkecimpung di dunia politik, dia adalah seorang komunikator yang handal dan kredibel.

Adapun tahapan kerja politik dakwah dapat dipahami dari skema berikut:

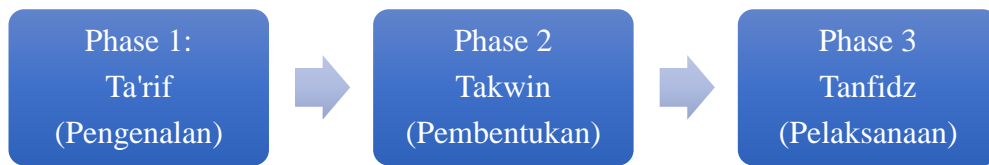


Figure 6: Tahapan kerja politik dakwah
Source: Abdul Hamid al-Ghazali¹⁷

Tabel 1
Aksi Pokok Dalam Tahapan Kerja Politik Dakwah

| Tahapan | Tujuan | Aksi |
|---------|--|---|
| Ta'rif | Masyarakat mengenal dengan baik pemikiran dan substansi Islam. | 1) Sosialisasi pemikiran 2) Revitalisasi peran ulama dalam politik 3) Mengokohkan politik sebagai kerangka kerja |
| Takwin | Intensifikasi unsur-unsur pendukung dan meningkatkan kredibilitas Lembaga. | 1) Analisis sistemik terhadap kondisi masyarakat dan perangkat perundang-undangan yang ada. 2) Mempersiapkan program pemberdayaan terpadu. |

¹⁷Abdul Hamid al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2001), 21.

| | | |
|---------|---|---|
| Tanfidz | Pelaksanaan berbagai program aplikatif. | 1) Mobilitas vertikal politik (masuk ke parlemen). 2) Kekuatan mobilisasi massa. 3) Mengkritisi kebijakan secara aktif. |
|---------|---|---|

Setelah memahami bahwa politik adalah bagian yang *inheren* di dalam dakwah, selanjutnya adalah mengenai peran perempuan dalam pendekatan dakwah dan politik. Landasan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk mengambil topik ini perempuan dan politik dalam penelitian ini.

Dalam Islam, setiap Muslim memiliki kewajiban berdakwah karena pengertian subjek dakwah secara umum adalah setiap muslim atau muslimat yang *mukallaf*. Sementara secara khusus, mereka yang mengambil keahlian khusus (*mutakhassis*) dalam bidang dakwah yang dikenal dengan *da'i*. Sehingga, tugas dakwah juga menjadi tanggungjawab kaum perempuan termasuk dalam konteks dakwah politik.

Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bernuansa politik dakwah. Dalam hal ini, partisipasi politik perempuan menjadi isu yang kemudian membutuhkan landasan pemikiran yang kuat dari al-Quran dan hadis sehingga memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk terlibat dalam setiap

kegiatan politik, tanpa harus terganjal oleh alasan-alasan teologis yang kerap dijadikan tameng untuk menghalangi partisipasi politik perempuan.

Landasan pemikiran ini berangkat dari landasan teologis al-Quran dan Hadis serta landasan filosofis untuk melihat sejauh mana perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan mengapa perempuan harus mengambil peran di politik. Kajian terhadap al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa walaupun terdapat ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi yang membatasi ruang gerak perempuan yang berimbas pada pembatasan perempuan dalam ranah politik, tetapi ayat-ayat dan hadis tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih dalam menyangkut kondisi sosial pada saat ayat atau hadis tersebut disampaikan oleh Nabi. Ditemukan bahwa kebanyakan ayat dan hadis Nabi menuntut adanya kesamaan baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam berbagai aktifitas termasuk dalam berpolitik.

Sayangnya, pemahaman keagamaan yang bias kemudian menghasilkan budaya yang belum berpihak pada peran politik perempuan masih dominan ditemukan di Indonesia. Interpretasi agama yang menguatkan komitmen publik perempuan belum menjadi mainstream. Sehingga tidak heran, pendapat maupun fatwa yang mengharamkan tampilnya perempuan menjadi pemimpin publik masih juga terdengar walaupun secara tegas konstitusi negara telah memberikan hak yang sama terhadap semua warga negaranya tanpa diskriminasi jenis kelamin.

Perempuan berhak menduduki jabatan politik meskipun ada sebagian yang tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin negara. Pendapat ini berdasarkan firman Allah swt dalam QS. At-Taubah [9]:71 yang artinya:

*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*¹⁸

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang sama dengan laki-laki, masing-masing boleh berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat di atas “*sebahagian menjadi penolong bagi yang lain*” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Tidak ada kegiatan yang mengecualikan perempuan dalam rangka melakukan tugas tersebut apalagi dalam upaya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Selain ayat di atas, masih ada ayat lain yang menjunjung tinggi persamaan antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat/49:1 dan QS. An-Nisa/4:1.

¹⁸Al-Qur'an, 9:7.

Kaum perempuan juga boleh berbai'at kepada Rasulullah saw sebagaimana halnya laki-laki. Allah swt memerintahkan untuk menerima bai'at dari padanya seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mumtahanah [60]:12 yang artinya:

*Hai nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*¹⁹

Secara umum disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan merupakan bagian dari umat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.

Hak politik perempuan adalah hak ikut bagi warga negara dalam menangani negara. Keikutsertaan ini dapat secara langsung maupun tidak langsung, yang dimaksud dengan cara langsung adalah warga negara secara langsung menangani urusan politik tidak dengan mewakilkan kepada orang lain, sedangkan secara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan di bidang tertentu bukan sebagai

¹⁹Al-Qur'an, 60:12.

pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh aturan politiknya melainkan dia dipilih oleh masyarakat dimana ia hidup.²⁰

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan dunia dan akhirat. Dengan demikian Islam memberi perhatian pada masalah-masalah yang berkaitan dengan urusan dunia dengan porsi yang cukup dan menjadikannya sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslim, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian terdapat pandangan sekelompok intelektual yang menuntut kaum perempuan mengambil bagian dalam menggunakan hak-haknya, termasuk hak politik dan hak lainnya dengan syarat tetap memenuhi kewajiban sebagai ibu rumah tangga, keluarga dan mendidikan anak-anaknya.²¹

Perempuan dalam berpolitik harus didasari dengan pedoman yang kuat, agar keterlibatannya dalam bidang politik memperoleh makna dalam memperjuangkan yang benar dan memerangi yang *bathil*. Adapun pedoman berpolitik bagi perempuan dalam Islam adalah :

- 1) Menyuruh (mengerjakan) yang *ma'ruf* dan mencegah dari yang mungkar, sebagaimana makna yang tersirat dalam QS.At-Taubah/9:71
- 2) Perempuan muslimah sebagaimana halnya laki-laki dihibau untuk ikut peduli terhadap masalah-masalah politik yang berkembang dalam masyarakat. Perempuan juga dituntut untuk mengambil bagian sesuai dengan batas-batas kemampuan dan kondisinya dalam membangun

²⁰Salim Ali Al Bahansawi, *As-Syari'ah Al-Muftara alaiha*. terj. Mustolah Mafur, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), 287.

²¹*Ibid.*, 295.

masyarakat. Dengan demikian ada peran perempuan yang harus dilakukan dalam bidang politik, diantaranya :

- a) Ikut mengemukakan pendapat mengenai isu-isu umum yang berkembang dalam masyarakat.
- b) Menyampaikan nasehat antara pro dan kontrak (*amar ma'ruf* dan *nahi munkar*)
- c) Mendukung partai atau aliran politik yang prinsipnya lebih dekat pada upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat.
- d) Bersedia untuk mencalonkan diri untuk duduk di DPR, jika perempuan mempunyai kemampuan untuk mewakili rakyat dari suatu daerah atau sektor.
- e) Memilih calon yang betul-betul mampu memikul amanah sebagai wakil rakyat, maksudnya melakukan hak pilih terhadap calon yang terbaik.²²

Islam adalah agama memberikan kesempatan bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berpartisipasi dalam politik, mengatur urusan masyarakat dan mampu bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing diantara mereka, sebagaimana Rasulullah saw bersabda yang artinya :

Abdullah bin Umar ra berkata Rasulullah saw bersabda: Kalian semuanya pemimpin (pemelihara) bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang amir (raja) memelihara rakyatnya dan akan ditanya pemeliharaannya.

²²Abd. Halim Abu Syuqqah, *Tahrirur Mar'ah fi Asri Risalah*. terj. Hairul Halim *Kebebasan Wanita*, Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 1999), 23.

Seorang suami memimpin keluarganya yang akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya, anak-anaknya akan ditanya tentang pimpinannya. Seorang hamba (buruh) memelihara harta majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua memelihara dan akan dituntut tentang pemeliharaannya.²³

Islam pada hakekatnya memandang bahwa perempuan adalah seorang anak manusia dengan seperangkat potensi yang ada pada dirinya sebagaimana layaknya yang dimiliki oleh laki-laki. Perempuan juga memiliki potensi berupa akal, naluri (untuk beragama, melestarikan keturunan, dan juga mempertahankan eksistensi diri), serta kebutuhan jasmani yang diberikan Allah swt kepada mereka. Seiring dengan adanya potensi tersebut, Allah swt menetapkan keduanya untuk menempati peran yang sama, yaitu sebagai hamba Allah swt, anggota keluarga dan warga negara (anggota masyarakat), bahkan ikut serta dalam berpolitik.

Pembicaraan partisipasi politik perempuan seakan-akan hanya tentang pemenuhan quota, bagaimana mereka bisa dipilih dan memilih, atau bagaimana undang-undang telah memberikan peluang partisipasi secara legal formal. Aspek mendasar yang bersifat kultural tentang bagaimana sebenarnya harapan-harapan budaya terhadap peran perempuan, bagaimana pandangan dan sikap elit politik partai terhadap perempuan, bagaimana praktek-praktek kehidupan yang sederhana melibatkan partisipasi perempuan untuk mengambil sebuah keputusan.

²³Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu wal Marjan*, Himpunan Hadis Shahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim (Cet. II; Surabaya: Bina Ilmu, 2003), 709-710.

Jika memakai pendekatan sosiologi dakwah, maka politik yang dijalankan oleh perempuan harus mengacu kepada cara kerja dakwah itu sendiri. Melalui pendekatan sosiologis terhadap fakta atau realitas dakwah tersebut, maka ilmu dakwah akan dapat berkembang secara lebih cepat. Kedepan harus dipikirkan tentang pengembangan lebih lanjut tentang term kajian baru yang penulis sebut sebagai dakwah emansipatoris.

Pengkajian dakwah yang lebih kontemporer, mulai memasuki sisi praktis pendekatan epistemologis dalam pengertian sekitar model dan pendekatan dakwah. Dalam konteks politik, salah satu tujuan dakwah perempuan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi politik perempuan. Sehingga lahirlah term dakwah emansipatoris yang lebih banyak merujuk kepada konsep Islam emansipatoris.

Dalam konteks kajian ini, penulis menggunakan latar partai politik sebagai objek dan subjek penelitian. Partai politik tentu saja harus membuat perempuan tertarik terlibat di dunia politik, partai politik memiliki peran untuk menyebarluaskan nilai-nilainya, pandangan-pandangan, dan sikap-sikapnya terhadap berbagai hal. Pada beberapa permasalahan yang dianggap perlu, partai politik juga menyerukan anggotanya untuk melakukan aksi-aksi. Langkah inilah yang akan kemudian digali dengan lebih mendalam. Tentang bagaimana konstruksi sosial perempuan dalam membangun makna politiknya sehingga dia mampu dan mau terlibat dalam politik. Bagaimana interaksi sosial sesama perempuan yang terlibat di dalam partai politik sehingga interaksi ini melibatkan simbol-simbol yang semakin menguatkan makna perempuan terhadap politik, dan yang ketiga adalah

bagaimana bentuk-bentuk implementasi dakwah emansipatoris dalam ruang lingkup partai politik.

Dalam penelitian ini, tradisi yang dipakai adalah tradisi sosiokultural. Tradisi sosiokultural memberikan penjelasan dalam banyak konteks dakwah. Secara umum, tradisi ini menjelaskan ide-ide berikut;²⁴ Pertama, proses terbentuknya pemahaman, makna, norma, peran dan aturan bekerja secara interaktif dalam dakwah. Kedua, tradisi ini menjelaskan dunia interaksional, dimana, orang hidup menempatkan ide bahwa realitas bukanlah perangkat objektif dari sebuah aturan di luar kita akan tetapi ini sebuah konstruksi yang dibentuk melalui proses interaksi dalam grup, komunitas dan budaya. Ketiga, menjelaskan lebih kepada pola interaksi dari pada karakteristik individual ataupun mental models.

Dalam hal ini, kata kuncinya adalah menggali pendekatan dakwah emansipatoris dalam proses konstruksi sosial dan interaksi sosial perempuan yang mengambil peran di ranah politik dalam hal ini adalah perempuan partai Gelora Indonesia juga menggambarkan bentuk implementasi dakwah emansipatoris. Berikut kerangka penelitian yang menggambarkan keseluruhan proses yang akan dilakukan:

²⁴ Littlejohn, S. W, Foss, K. A, dan Oetzel, J. G. *Theories of Human Communication* 11th Edition, (Illinois: Waveland Press Inc, 2017), 45